

# Ekonomi Pancasila Bantu Wujudkan Masyarakat Madani Seminar Nasional Menuju Masyarakat Madani Lestari

Rabu, 19 Desember 2012

Dalam konteks kekinian, kondisi masyarakat di Indonesia belum sepenuhnya mengarah pada tatanan masyarakat Madani. Pakar Ekonomi Pembangunan, Prof. Dr. Edy Suandi Hamid, M.Ec menilai hal itu disebabkan masih adanya kebijakan-kebijakan ekonomi pemerintah pasca reformasi yang tidak menyentuh pada akar masalah struktural seperti kemiskinan, pengangguran dan korupsi.

“Penyebabnya tidak lain karena kebijakan pemerintah pasca reformasi dibangun dalam suasana keterjajahan ekonomi dan dominasi neoliberal, tanpa kesadaran yang cukup untuk terbebas darinya” terang Rektor UII ini pada Seminar Nasional yang bertema Menuju Masyarakat Madani (Diseminasi Hasil-hasil Penelitian), yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) UII, Selasa, (18/12), di Gedung Moh. Hatta, Kampus terpadu UII. Menurutnya, meski Indonesia menjelang tujuh Dasawarsa kemerdekaannya mengalami capaian positif dari segi ekonomi, namun di tengah “prestasi” itu masih ada ketimpangan ekonomi. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi di Indonesia memang meningkat akan tetapi aspek pemerataan kurang berjalan dengan semestinya. Akibatnya hanya masyarakat golongan tertentu saja yang bisa merasakan hasil pertumbuhan tersebut. “Artinya yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin” tambah pria yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI). Di tengah berbagai kegagalan yang terjadi selama ini, Prof. Edy mentikberatan pola penyelesaiannya dikembalikan pada konsep Ekonomi Pancasila sebagai platform kebijakan ekonomi. Alasannya tidak lain karena selama ini sistem yang dicoba pada ekonomi Indonesia terbukti gagal mewujudkan cita-cita kesejahteraan dan keadilan. “Ekonomi Pancasila mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan mengingat watak dasarnya sebagai ekonomi yang berbasis pada kepentingan rakyat banyak” tegasnya. Prof. Edy menambahkan apabila ditelisik lebih jauh, kerangka ekonomi Pancasila yang berbasis pada kesejahteraan dan keadilan merupakan dwitunggal yang senantiasa menjadi tujuan pembangunan. Sehingga melalui kebijakan ekonomi yang berlandaskan Pancasila tidak lain akan memenuhi salah satu indikator untuk mewujudkan masyarakat madani atau civil society. Yaitu dengan tidak lagi memunculkan diskriminasi dalam berbagai bidang pembangunan yang berorientasi untuk kemakmuran rakyat. Pembicara lain juga turut menyampaikan materi dalam seminar tersebut, antara lain Prof. Ir. H. WIDODO, MSCE., Ph.D (Guru besar FTSP UII) dan Dr. Chairil Anwar (Dosen FMIPA UGM).

PROSIDING SEMINAR NASIONAL